

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan semakin banyak negara Asia Tenggara menjadikan transformasi ekonomi sebagai target utama kebijakannya, problem yang timbul akibat bertambahnya penempatan kerja di sektor informal semakin mengemuka. Di Manila, ibukota Filipina, tingkat penempatan kerja pertama lulusan perguruan tinggi hanya mencapai sekitar 40 persen. Pemerintah baru Thailand setelah dilantik kemungkinan akan menaikkan standar upah minimum, namun para ekonom khawatir tindakan itu akan menambah beban perusahaan formal dan memaksa lebih banyak penganggur memasuki sektor lapangan kerja informal.

Meski berbagai negara mempunyai definisi yang berbeda mengenai penempatan kerja informal, namun dilihat dari keadaan negara-negara Asia Tenggara, persamaannya adalah bahwa pekerja di sektor informal adalah pekerja badan usaha swasta individu atau di bawah 10 orang. Upah dan pekerjaan mereka tidak tetap dan tidak ada jaminan sosial.

Menurut laporan Organisasi Kerja Sama Ekonomi, penempatan kerja di sektor informal menempati dua per tiga lapangan kerja baru di Asia Tenggara. Sementara ekonom berpendapat, di pasar lapangan kerja, hanya apabila lapisan tengahnya tebal dan peluang kenaikan dari lapisan bawah ke lapisan tengah dan tinggi cukup besar, baru dapat menjamin perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Tapi situasi di pasar penempatan kerja Asia Tenggara sekarang ini adalah lapisan bawah terlalu besar, sedang lapisan tengah terlalu kecil.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja migran di negara-negara ASEAN sangat besar, mencapai lebih 5,7 juta orang. Singapura, Malaysia dan Thailand merupakan negara utama pengimpor tenaga kerja bukan trampil, Indonesia, Myanmar dan Filipina adalah negara-negara utama pengekspor tenaga kerja tersebut. Laos dan Myanmar yang persentase populasi pertaniannya masih cukup besar tidak banyak mengalami tekanan penempatan kerja, namun jalur penempatan kerja yang sempit sudah mulai mendorong penduduk pertanian mengalir ke negara-negara sekitar.

Di negara-negara Asia Tenggara, jumlah pekerja informal sangat banyak. Di Thailand misalnya, meski tingkat pengangguran tahun lalu hanya 1,5 persen, namun sebagian besar tenaga kerja mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima dan pekerjaan informal lainnya. Menurut statistik Bank Dunia, penempatan kerja di sektor informal di Filipina mengambil porsi 45 persen, Thailand di atas 52 persen dan Malaysia 20 persen. Tingginya tingkat penempatan kerja di sektor informal merupakan faktor penting negara-negara tersebut sulit merealisasikan transformasi struktur ekonomi.

Banyaknya tenaga kerja di sektor informal membuat upaya untuk menaikkan penghasilan kelompok lapisan bawah menghadapi banyak kesulitan. Tuntutan kenaikan upah kini sedang gencar dikumandangkan di Thailand, Indonesia dan Filipina, namun kenaikan upah minimum hanya mungkin dilaksanakan di perusahaan milik negara, perusahaan asing dan perusahaan swasta yang besar, tapi ini juga akan menambah biaya produksi perusahaan-perusahaan tersebut sehingga kemungkinan mereka akan mem-PHK-kan sejumlah

karyawannya. Alhasil, lebih banyak tenaga kerja akan mengalir ke sektor informal dan menekan penghasilan pekerja sektor tersebut.

Salah satu tantangan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengembangkan ekonomi adalah meningkatkan taraf tenaga kerja dan memasukkan tenaga kerja sektor informal ke dalam sistem upah dan kesejahteraan nasional. Pemerintah Indonesia, Thailand, Filipina dan negara-negara lain telah menggulirkan program peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) juga menjadikannya sebagai titik berat program bantuannya.

Di negara berkembang seperti Indonesia, dimana peranan sektor informal sangat besar, sudah waktunya angka pengangguran tidak lagi sebagai indikator untuk melihat dinamika pasar tenaga kerja. Diperlukan sebuah pemahaman baru terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa masalahnya bukanlah orang bekerja atau tidak bekerja, melainkan kesejahteraan pekerja yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang mereka peroleh.

Menurut Data BPS (2012:1) Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding Februari 2011. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 juta orang atau bertambah 1,5 juta orang dibanding keadaan Februari 2011. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen

dan TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen. Selama setahun terakhir (Februari 2011- Februari 2012), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, terutama di Sektor Perdagangan sekitar 780 ribu orang (3,36 persen) serta Sektor Keuangan sebesar 720 ribu orang (34,95 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian 1,3 juta orang (3,01 persen) dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 380 ribu orang (6,81 persen). Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2012, sebesar 77,2 juta orang (68,48 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 per minggu mencapai 6,9 juta orang (6,08 persen). Pada Februari 2012, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 55,5 juta orang (49,21 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma sekitar 3,1 juta orang (2,77 persen) dan pekerja dengan pendidikan universitas hanya sebesar 7,2 juta orang (6,43 persen) (BPS,2012:2).

Selama pembangunan jangka panjang pertama perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang berada diatas 5 % pertahun. Namun dibalik itu ada fenomena lain yang perlu dicermati. Secara nasional proporsi pekerja sektor informal ternyata lebih besar dari sektor formal. Pada tahun 1971 proporsi pekerja sektor informal terhadap jumlah angkatan kerja di kota mencapai sekitar 25 persen. Angka ini meningkat menjadi 36 persen pada tahun 1980 dan 42 persen. pada tahun 1990. Pasca krisis ekonomi, proporsi pekerja sektor informal tersebut meningkat tajam. Tahun 2000 proporsi pekerja sektor informal terhadap jumlah angkatan kerja di kota menjadi sekitar 65 persen (Firnandy, 2004 : 4). Untuk tahun 2006, menurut Badan Pusat

Statistik kesempatan kerja sektor informal sebanyak 60,8 juta atau sekitar 64 persen dari total kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal masih cukup dominan menyerap tenaga kerja khususnya di perkotaan. Selain itu ada indikasi bahwa perkembangan ekonomi ternyata belum dapat mengatasi persoalan klasik keterbatasan peluang kerja.

Pada akhir-akhir ini berkembang perbedaan antara sektor formal dan sektor informal. Sektor formal mencakup perusahaan-perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan ijin resmi, umumnya berskala besar. Sedang usaha-usaha yang tergolong sektor informal memiliki beberapa ciri. Umumnya sederhana, tidak tergantung pada kerjasama banyak orang dan sistem pembagian kerja yang tidak ketat serta skala usaha relatif kecil. Pada umumnya usaha sektor informal tidak mempunyai ijin usaha dan untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada bekerja di perusahaan formal. Tingkat penghasilan di sektor informal umumnya rendah. Walaupun tingkat keuntungan kadang-kadang cukup tinggi, akan tetapi karena omset penjualan relatif kecil, keuntungan absolut umumnya menjadi kecil. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil dan usaha sektor informal sangat beraneka ragam.

Usaha sektor informal pada umumnya tersebar pada kegiatan industri mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, usaha diklasifikasikan menjadi tiga yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk perniagaan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar 1 milyar

atau kurang. Dikategorikan sebagai usaha menengah apabila nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp 1 milyar namun < 50 milyar (Denny, 2011: 2).

Sektor informal sering dikaitkan dengan ciri – ciri utama pengusaha dan pelaku informal, antara lain kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah. Sedangkan menurut BPS, pekerja sektor informal adalah mereka yang status pekerjaannya adalah; pertama, berusaha sendiri. Kedua, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga / buruh tidak tetap. Ketiga, pekerja tidak tetap / pekerja keluarga.

Peranan sektor informal semakin besar setelah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi ini menyebabkan kesulitan keuangan bagi pemerintah dan sektor swasta. Sektor swasta yang paling terpuak dengan adanya krisis ini adalah sektor industri manufaktur, konstruksi, properti dan perusahaan jasa khususnya sektor pariwisata. Sebagai respon atas kondisi diatas, banyak perusahaan mengurangi waktu operasinya atau bahkan tutup sama sekali. Perusahaan yang masih bisa bertahan, berusaha menurunkan biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja atau menurunkan tingkat upah. Dalam kondisi ini, sektor informal merupakan alternatif bagi tenaga kerja agar tetap mempunyai penghasilan.

Dorongan untuk mencukupi kebutuhan hidup, membuat orang yang kehilangan pekerjaan berusaha untuk bekerja apa saja. Secara umum sektor informal memberikan *return* yang kecil, apalagi pada saat situasi krisis, tetapi

alternatif ini tetap harus diambil tenaga kerja karena alasan kebutuhan hidup tadi. Krisis ekonomi membuat perubahan dalam struktur tenaga kerja Indonesia dengan semakin berperannya sektor informal.

Penghasilan tenaga kerja informal bukan berupa upah yang diterima tetap setiap bulannya, seperti halnya tenaga kerja formal. Upah pada sektor formal diintervensi pemerintah melalui peraturan Upah Minimum Propinsi (UMP). Tetapi penghasilan pekerja informal lepas dari campur tangan pemerintah. Penelitian ini mencoba menganalisa kesejahteraan relatif tenaga kerja informal dengan membandingkan pendapatan pekerja informal dengan Upah Minimum Propinsi sebagai tingkat penghasilan minimum yang diperoleh oleh tenaga kerja formal, dengan menggunakan variabel-variabel bebas lokasi usaha, lapangan usaha, rata-rata jam kerja seminggu, jumlah modal, serta variabel interaksi antara rata-rata jam kerja dan jumlah modal.

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.

Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku ekonomi sektor informal, antarlain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, tenaga kerja yang tidak terampil terutama berasal dari tenaga kerja

keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya alam, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah.

Kehadiran tenaga sektor informal memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ekonomi lokal dan perannya cukup signifikan dalam menunjang dan menopang kehidupan sehari-hari. Namun disatu sisi keberadaan para pekerja sektor informal menjadi persoalan yang cukup merepotkan bagi penataan tata kota. Karena mereka kebanyakan berada dikawasan legal dan ilegal diinti kota. Konsekwensinya berpeluang dan menambah kekumuhan kota apalagi tidak ada penataan dan aturan yang jelas terhadap sektor informal untuk mengatur diri sendiri. Rata-rata pekerja sektor informal kesulitan untuk melepaskan diri dari himpitan ekonomi. Mereka yang terjebak dalam sektor informal selalu kesulitan untuk melepaskan diri dari atribut masyarakat miskin yang dialami sebelumnya ketika tinggal di desa (Winarno,2005 : 2)

Didaerah perkotaan sering diidentikkan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat bekerja di bidang sektor informal. Penduduk marginal atau pengangguran tersembunyi dimana kehadiran mereka dapat dipandang dari dua sisi negatif dan positif. Pada sisi negatif kehadiran mereka berdampak negatif seperti timbulnya kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan serta kesadaran hukum yang rendah. Pada sisi yang positif, kehadiran mereka memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ekonomi lokal perkotaan, karena menghasilkan nilai terhadap penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang mereka bayarkan kepada pemda setempat. Disamping itu sektor

informal mampu menyerap angkatan kerja dan mengurangi permasalahan sosial di perkotaan.

Pembangunan ekonomi Kota Medan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dan diselenggarakan secara terpadu antara sektor yang satu dengan sektor yang lain. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Provinsi Sumatera Utara, diantaranya dengan menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada posisi yang strategis untuk mempercepat pertumbuhan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, serta sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen dan konsumen. Pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya dalam hal menyediakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, mempercepat pemulihan ekonomi, serta memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2004 di Sumatera Utara terdapat pekerja informal sebesar 63,9% sedangkan pada tingkat nasional pekerja sektor informal mencapai 65,8% dari total pekerja. Data ini menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara termasuk kota Medan. Jumlah pekerja informal pada tahun 2005 mencapai 61 juta orang atau 64 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Angka tersebut meningkat dari waktu ke waktu karena penyerapan tenaga kerja di sektor formal tidak signifikan. Jumlah angkatan kerja tidak kurang dari 105,8 juta orang. Setiap enam bulan jumlah penganggur

baru bertambah sebesar 600.000 orang. Itu berarti bahwa sebagian dari yang bekerja dari tambahan pekerja baru diserap di sektor informal (BPS, 2004:3).

Sebagai gambaran mobilitas dan persebaran penduduk dan tenaga kerja di Kota Medan, dengan jumlah penduduk mencapai 2.097.610 jiwa (2010). Dibanding hasil Sensus Penduduk 2000, terjadi pertambahan penduduk sebesar 193.337 jiwa (10.15%).

Sektor informal merupakan unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sektor informal kini menjadi salah satu kebijakan eksplisit ekonomi dalam pembangunan nasional, dimana sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat serta penopang dalam menghadapi permasalahan ekonomi seperti lapangan kerja, bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal.

Penduduk yang bekerja di sektor informal dikatakan sebagai penduduk marginal karena motivasi kerja mereka semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari, bukan untuk menumpuk keuntungan atau meraih kekayaan (Todaro, 2004 : 4)

Oleh sebab itu di era otonomi daerah saat sekarang ini hendaknya para pemerintah daerah membuat suatu kebijakan bagi sektor informal karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal akan berpaling atau beralih mencari pekerjaan di sektor informal yang diharapkan akan menyangga kehidupannya. Mereka yang bekerja di sektor informal adalah bekerja sendiri dengan atau bantuan orang lain dan bekerja rumah tangga.

Menurut Hendri Saparini dan M.Chatib Basri dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Definisi yang lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum, Sedangkan ciri-ciri kegiatan-kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, ketrampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antarlain Pedagang Kaki Lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen, anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya. Eksistensi sektor informal tidak dapat diabaikan. Saat situasi krisis ekonomi, sektor informal dapat berfungsi sebagai katup pengaman masalah ketenagakerjaan.

Selama kurun waktu 2006 – 2009 terjadi peningkatan kesempatan kerja sebanyak 68. 368 orang atau rata-rata tercipta lapangan kerja pertahunnya sekitar 22.789 orang. Data menunjukkan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja di Kota Medan belum sebanding dengan penambahan lapangan kerja. Sehingga

salah satu persoalan pokok yang masih dihadapi dalam pembangunan Kota Medan selama kurun waktu 2006 – 2009 adalah relatif masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT).

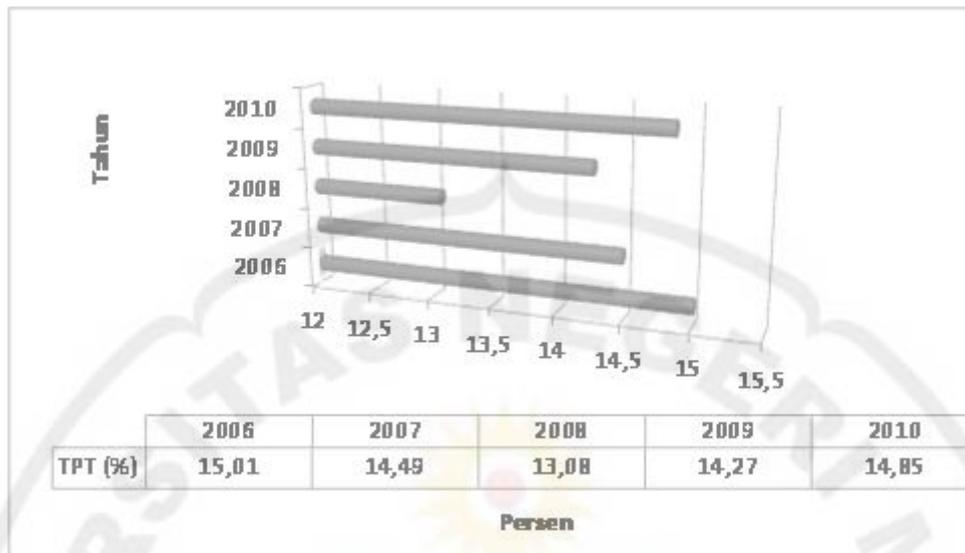


Sumber : BPS (2012 : 4)

Gambar 1.1. Pertumbuhan tenaga Kerja di Kota Medan

Selama kurun waktu 2006 – 2010, TPT di Kota Medan mengalami sedikit penurunan, yakni dari 15,01% pada tahun 2006 menjadi 14,85% di tahun 2010. Hal ini memberi gambaran bahwa dari 100 orang yang termasuk angkatan kerja pada tahun 2010 masih terdapat sekitar 15 orang yang menganggur.

Perkembangan TPAK Kota Medan menunjukkan tren menurun, dikarenakan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota menyebabkan semakin banyak angkatan kerja yang lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi daripada bekerja. Hal ini menunjukkan tren semakin membaiknya mutu SDM dan kondisi perekonomian Kota Medan. Selengkapnya dapat dilihat dari gambar



Sumber : BPS (2012 : 5)

**Gambar 1.2. Persentasi Pertumbuhan Angkatan Kerja di Kota Medan**

Urusan Ketenagakerjaan dihadapkan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengatasi pengangguran, pembinaan hubungan industrial dan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan menunjukkan hasil seperti berikut:

- a. Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan kerja pada Tahun 2010 sebesar 65,18%
- b. Jumlah Presentase Pekerja yang Ditempatkan pada tahun 2010 sebesar 5.132 Orang atau 32,09%.

Dalam membahas aspek ketenagakerjaan, pada umumnya yang paling sering dilihat adalah angka pengangguran. Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi selama periode 2006 – 2008 adalah relatif masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.

**Tabel 1.1. Indikator Ketenagakerjaan di Kota Medan  
Tahun 2006 – 2008**

Jenis Indikator	TAHUN		
	2006	2007	2008 <sup>a)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Angkatan Kerja	889.352	853.562	959.309
- Bekerja	755.882	729.892	833.832
- Pengangguran	133.470	123.670	125.477
2. Bukan Angkatan Kerja	540.142	602.648	573.562
- Sekolah	331.164	232.616	211.687
- Mengurus Rumah	273.575	300.779	285.450
- Lainnya	71.993	69.253	76.425

Sumber: BPS Kota Medan ( 2010 : 7)

Indikator ketenagakerjaan di Kota Medan dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu penduduk yang termasuk angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan penganggur (termasuk di dalamnya orang yang mencari kerja). Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga (IRT) dan lainnya.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa yang termasuk angkatan kerja selama periode 2006 – 2008 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja di Kota Medan pada tahun 2006 sebesar 889.352 orang, namun pada tahun 2007 terjadi penurunan menjadi 853.562 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2007 telah terjadi peningkatan kesadaran bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga hal ini berdampak pada menurunnya angkatan kerja pada tahun 2007, dan disisi yang lain semakin bertambahnya jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja menjadi 602.648 orang. Selanjutnya pada tahun 2008 terjadi peningkatan kembali jumlah angkatan kerja di Kota Medan menjadi

959.309 orang dan sebaliknya terjadi penurunan jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja menjadi 573.562 orang untuk tahun yang sama.

Seiring dengan perkembangan jumlah angkatan kerja yang ada, maka jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja di Kota Medan juga mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2006 sebesar 540.142 orang. Pada tahun 2007 terjadi penambahan jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja menjadi 602.648 orang, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan kembali menjadi 573.562 orang. Hal ini dikarenakan mereka yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi semakin bertambah. Di samping itu, adanya kemungkinan mereka yang tadinya bekerja tetapi tidak bekerja lagi dan sekarang berubah menjadi ibu rumah tangga. Kondisi di atas juga menunjukkan terjadi perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Medan, dimana pada tahun 2006 sebesar 62,21% menjadi 58,62% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kembali menjadi 62,58%.

Berbagai permasalahan yang menyangkut tenaga kerja sektor informal menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Tenaga kerja Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Tenaga Kerja di Kota Medan**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang timbul dalam menganalisis masalah tenaga kerja dan peran sektor informal sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Modal usaha Upah tenaga kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Usaha pada sektor informal di Kota Medan?

2. Bagaimana secara parsial pengaruh Modal Kerja, Upah, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Usaha Tenaga kerja Informal terhadap permasalahan tenaga kerja pada sektor informal di Kota Medan ?
3. Bagaimana secara serentak pengaruh Modal Kerja, Upah, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Usaha Tenaga kerja Informal terhadap permasalahan tenaga kerja pada sektor informal di Kota Medan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kondisi Modal usaha, Upah tenaga kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Usaha pada sektor informal di Kota Medan
2. Untuk mengetahui bagaimana secara parsial pengaruh Modal Kerja, Upah, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Usaha Tenaga kerja Informal terhadap permasalahan tenaga kerja pada sektor informal di Kota Medan
3. Untuk mengetahui bagaimana secara serentak pengaruh Modal Kerja, Upah, Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Usaha Tenaga kerja Informal terhadap permasalahan tenaga kerja pada sektor informal di Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui masalah-masalah tenaga kerja sektor informal di kota Medan.

2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam mengambil kebijakan/keputusan mengenai Tenaga Kerja Sektor Informal dan pengembangannya.
3. Bagi Penulis untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah Ketenagakerjaan Sektor Informal, serta berguna sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terutama dalam ruang lingkup yang sama.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY